

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan serta mendorong perkembangan perekonomian. Menurut Tambunan (2021), UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu maupun badan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah pada berbagai sektor ekonomi. Karakteristik UMKM yang relatif fleksibel menjadikannya mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Eksistensi UMKM memberikan kontribusi yang signifikan, di antaranya dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan taraf pendapatan warga, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut informasi dari ekon.go.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengemukakan bahwa ada 64 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2025, yang akan menyerap lebih dari 97 persen lapangan kerja serta menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Dominasi UMKM ini menunjukkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh keberlanjutan dan kualitas UMKM (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Meskipun memiliki kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan dalam mengelola usahanya, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan keuangan yang belum optimal (Jayanti et al., 2023).

Pencatatan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha karena berfungsi sebagai dasar dalam mengetahui kondisi keuangan suatu usaha. Menurut Alexander Thian (2021) mengemukakan bahwa proses pencatatan diawali dengan menganalisis transaksi yang terjadi guna mengetahui pengaruhnya terhadap unsur-unsur keuangan yang terkait. Melalui pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur dan sistematis,

pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, laba, serta arus kas usaha yang dijalankan. Informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi usaha maupun pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, proses pencatatan keuangan perlu dijalankan secara cermat dan berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan secara optimal (Ramadhan et al., 2025).

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah pedoman akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan maksud meningkatkan mutu pencatatan serta penyusunan laporan keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2018), standar ini menetapkan prosedur penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan beberapa jenis laporan keuangan lainnya. Standar ini dirumuskan dengan konsep yang sederhana dan mudah dicerna sehingga dapat diterapkan dengan lebih praktis oleh para pelaku UMKM (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Meskipun demikian, hingga kini masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum berhasil mengimplementasikan pencatatan keuangan yang selaras dengan ketentuan yang telah diberlakukan (Zahra & Norsita, 2025).

Besarnya potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang pembangunan ekonomi nasional sayangnya belum sejalan dengan kualitas pengelolaannya yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pencatatan dan manajemen keuangan yang merupakan elemen krusial bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu usaha. Kendala mendasar yang kerap dijumpai pada UMKM adalah belum maksimalnya praktik pencatatan serta penyusunan laporan keuangan, mengingat prosesnya masih dikerjakan secara sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku (Jayanti et al., 2023). Akibatnya, data keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya menggambarkan keadaan finansial perusahaan dengan tepat dan menyeluruh.

Ketidakmampuan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan pencatatan keuangan yang sesuai standar bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan juga berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan dan kelangsungan hidup usaha mereka. Tidak adanya pencatatan transaksi yang tersusun secara sistematis dan berurutan menyebabkan pelaku usaha kesulitan melakukan pemisahan antara dana operasional usaha dan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika UMKM memerlukan tambahan pembiayaan dari pihak eksternal, seperti perbankan maupun koperasi. Ketidakmampuan menyediakan informasi transaksi yang valid dan terpercaya menyebabkan UMKM dikategorikan sebagai *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan perbankan). Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses pembiayaan, sehingga kesempatan untuk memperluas skala usaha menjadi semakin kecil dan perkembangan usaha cenderung terhambat (Abdullah et al., 2025).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur yang turut memengaruhi bagaimana praktik pencatatan keuangan dijalankan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kapasitas seseorang dalam memahami suatu informasi serta mengelola usahanya secara lebih terstruktur. Sebagaimana dikutip Jayanti et al. (2023) dari Hasbullah, tingkat pendidikan merujuk pada jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani dan diselesaikan oleh seseorang, sesuai dengan sistem pendidikan yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Semakin tinggi pendidikan mereka, maka kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akan semakin meningkat.

Selain tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi juga menjadi faktor penting dalam pencatatan keuangan. Bahri (2020) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis (Bahri, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, pemahaman akuntansi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam memahami serta menerapkan tahapan-tahapan akuntansi untuk menghasilkan informasi

keuangan yang bermanfaat. Pemahaman akuntansi yang memadai berperan dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan serta pelaporan transaksi secara tepat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Siregar & Akbar, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni Oktavia dan Putu Riesty Masdiantini (2023), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan serta pemahaman akan akuntansi memberikan kontribusi terhadap penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami berbagai konsep akuntansi. Selain itu, pemahaman akuntansi yang baik juga mendorong pelaku usaha untuk menyusun pencatatan keuangan secara terstruktur dan mengacu pada standar yang telah diberlakukan. Dengan demikian, kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pencatatan keuangan UMKM.

Rendahnya penerapan SAK EMKM tidak hanya menjadi permasalahan pada skala nasional, tetapi juga berkembang menjadi isu penting di lingkungan pemerintahan desa yang tengah berupaya memperkuat perekonomian masyarakat. UMKM yang berada di wilayah pedesaan umumnya menghadapi berbagai hambatan yang lebih kompleks, seperti terbatasnya akses terhadap informasi, kurangnya pelatihan di bidang akuntansi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pencatatan keuangan berbasis standar akuntansi belum berjalan secara optimal (Mu'as, 2024). Oleh sebab itu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi memengaruhi praktik pencatatan keuangan pelaku UMKM, diperlukan pengkajian yang lebih terfokus pada wilayah pedesaan yang sedang berkembang, salah satunya di Desa Tanjungmekar.

Desa Tanjungmekar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Tanjungmekar, jumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut pada tahun 2024 mencapai 217 unit usaha. UMKM tersebut bergerak di berbagai bidang usaha

yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat desa. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan di Desa Tanjungmekar.

Selain itu, data profil Desa Tanjungmekar menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya 70 orang penduduk yang buta huruf dan 50 orang yang tidak menamatkan pendidikan dasar. Mayoritas masyarakat didominasi oleh lulusan SD/MI sebanyak 1.245 orang, disusul lulusan SMP/MTs sebanyak 650 orang, serta lulusan SMA sebanyak 379 orang. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi masih sangat terbatas dan kurang dari dua persen dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Tanjungmekar masih berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sehingga mengindikasikan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang berpotensi memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam memahami konsep akuntansi serta mengimplementasikan praktik pencatatan keuangan yang selaras dengan SAK EMKM.

Permasalahan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan bukan semata-mata disebabkan oleh terbatasnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki, tetapi juga erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman di bidang akuntansi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Desa Tanjungmekar. Sebagian besar pelaku usaha menjalankan usahanya secara mandiri ataupun melanjutkan usaha keluarga secara turun-temurun tanpa memperoleh pembelajaran mengenai literasi keuangan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal. Selain itu, minimnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan SAK EMKM dari pihak instansi terkait mengakibatkan berbagai konsep fundamental akuntansi, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha. Keterbatasan pengetahuan tersebut akhirnya memunculkan anggapan bahwa akuntansi merupakan sesuatu yang sulit dipahami dan tidak memiliki urgensi tinggi bagi usaha berskala kecil.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah pelaku UMKM di Desa Tanjungmekar menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan belum optimal. Sebagian pelaku usaha belum menjalankan pencatatan transaksi keuangan secara konsisten dan rutin. Bahkan, sejumlah pelaku UMKM masih bertumpu pada daya ingat dalam mendokumentasikan transaksi usahanya, dan ada pula yang sama sekali belum melakukan pencatatan keuangan apapun. Selain itu, terdapat pula pelaku UMKM yang sudah mulai melakukan pencatatan, namun cara penyusunannya masih tergolong sederhana dan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Keadaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara betapa pentingnya pencatatan keuangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan kajiannya pada kualitas laporan keuangan atau pada penerapan SAK EMKM pada UMKM. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pencatatan keuangan sebagai tahapan awal dalam proses penyusunan laporan keuangan masih tergolong terbatas. Padahal, pencatatan keuangan merupakan komponen mendasar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mendukung penerapan standar akuntansi. Apabila pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan sistematis, maka informasi yang dihasilkan berpotensi menjadi kurang akurat dan kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik pencatatan keuangan menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait praktik pencatatan keuangan pada UMKM. Sehubungan dengan hal itu, studi ini diarahkan untuk menelaah dan menganalisis sejauh mana tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berkontribusi terhadap praktik pencatatan keuangan yang mengacu pada SAK EMKM, khususnya pada UMKM di Desa Tanjungmekar. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi terhadap**

Praktik Pencatatan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Desa Tanjungmekar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum menerapkan pencatatan keuangan dalam kegiatan usahanya.
2. Sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah melakukan pencatatan keuangan, namun penerapannya belum sesuai dengan SAK EMKM.
3. Rendahnya tingkat pendidikan.
4. Kurangnya pemahaman akuntansi pada pelaku UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar ke luar topik utama, maka lingkup pembahasannya dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian adalah tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi.
2. Variabel dependen adalah praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
3. Penelitian ini menguji pengaruh variabel secara parsial maupun simultan.
4. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di Desa Tanjungmekar.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Desa Tanjungmekar?

2. Apakah pemahaman akuntansi memengaruhi praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Desa Tanjungmekar?
3. Apakah tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Desa Tanjungmekar?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
2. Mengetahui sejauh mana pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
3. Mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah, khususnya dalam disiplin ilmu akuntansi yang berkaitan dengan praktik pencatatan keuangan pada UMKM. Di samping itu, hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya literatur yang membahas penerapan SAK EMKM, berikut faktor-faktor yang turut mempengaruhinya, seperti jenjang pendidikan dan tingkat pemahaman akuntansi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai praktik pencatatan keuangan dalam usaha nyata.
- b. Bagi Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan serta mendorong mereka untuk menerapkan pencatatan keuangan secara lebih sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Bagi Pihak Terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pendamping UMKM, serta pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan, program pembinaan, dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan literasi akuntansi dan pengelolaan keuangan UMKM.

